HAKIKI
Jurnal Integrasi dan Studi Islam

Published by Yayasan Yetti Afrida Center
pISSN 3164-8355 | eISSN 3164-8347
Vol. 1 No. 1 Agustus 2026 | Pages 1-16
https://yettiafridacenter.com/hakiki
This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Tinggi di Era Transformasi Digital

Dwi Afriyanto[1]
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
[1]Email: dwi.afriyanto@mail.ac.id

ABSTRACT

Purpose: *This article analyzes how Islamic values can be integrated into higher education during digital transformation. It focuses on curriculum, teaching, assessment, artificial intelligence, academic integrity, student development, digital inclusion, and institutional governance so that technological change remains connected to the moral and educational purposes of the university.*

Design/Methodology: *The article uses an integrative evidence-synthesis approach based on 15 peer-reviewed publications published between 2023 and 2026, all with verifiable Digital Object Identifiers (DOIs). The studies were mapped according to Islamic values, digital transformation domains, ethical risks, learning practices, student engagement, and institutional responses.*

Findings: *The synthesis shows that meaningful integration occurs when Islamic values are translated into operational standards rather than presented only as normative statements. Tawhid, adab, amanah, justice, ihsan, tabayyun, and maslahah can guide digital competence, responsible AI use, academic integrity, inclusive access, information verification, and value-based institutional decision-making.*

Practical Implications: *Universities should redesign learning outcomes, digital assignments, assessment, AI policies, lecturer development, student activities, and digital governance so that ethical reflection is embedded in everyday academic practice. Value integration should be observable in how students verify information, acknowledge sources, use AI transparently, protect data, treat others fairly, and evaluate the social consequences of technology.*

Originality/Value: *This article proposes an integrated pathway linking Islamic values, institutional practices, ethical digital competence, and responsible academic behavior. It treats digital transformation as an educational and moral change process, not merely as the adoption of platforms, while offering a practical maturity model and evaluation indicators for Islamic higher education.*

Keywords: *Islamic values; higher education; digital transformation; digital ethics; artificial intelligence; Islamic higher education*

Received: 15/07/2026	Accepted: 22/07/2026	Published: 10/08/2026

A. INTRODUCTION (PENDAHULUAN)

Transformasi digital telah mengubah cara perguruan tinggi menjalankan hampir seluruh fungsi akademiknya. Perkuliahan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada ruang kelas, bahan ajar tersedia melalui platform digital, layanan akademik semakin berbasis data, dan kecerdasan artifisial mulai digunakan untuk mencari informasi, menyusun ide, memberi umpan balik, menerjemahkan teks, serta membantu analisis. Perubahan ini menawarkan efisiensi dan akses yang luas, tetapi pada saat yang sama mengubah cara mahasiswa belajar, cara dosen membimbing, serta cara institusi menentukan apa yang dianggap sebagai proses akademik yang sah dan bermakna.

Perubahan tersebut perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar perpindahan dari layanan manual menuju layanan berbasis aplikasi. Fernández et al. (2023) menunjukkan bahwa transformasi digital perguruan tinggi pada dasarnya merupakan perubahan organisasi yang menyentuh informasi, proses, manusia, strategi, dan budaya. Artinya, kampus yang mempunyai learning management system, sistem akademik daring, dan akses terhadap aplikasi kecerdasan artifisial belum tentu telah mengalami transformasi yang utuh. Teknologi baru akan bernilai pendidikan apabila digunakan untuk memperkuat mutu pembelajaran, kemampuan berpikir, akses yang adil, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hubungan manusia yang tetap bermartabat.

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Bagi pendidikan tinggi Islam, persoalan itu memiliki lapisan tambahan. Perguruan tinggi dituntut responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi pada saat yang sama harus mempertahankan orientasi pendidikan yang menempatkan ilmu, akhlak, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai satu kesatuan. Firdaus et al. (2025) memperlihatkan bahwa integrasi nilai Islam dan teknologi digital dapat menjadi bagian dari transformasi kelembagaan, bukan dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri. Tantangannya adalah bagaimana nilai Islam hadir dalam keputusan nyata: ketika dosen merancang tugas, ketika mahasiswa menggunakan AI, ketika kampus mengelola data, ketika penilaian dilakukan, dan ketika teknologi memengaruhi relasi sosial di lingkungan akademik.

Kajian tentang nilai Islam di perguruan tinggi menunjukkan bahwa istilah seperti tauhid, amanah, adab, ihsan, keadilan, dan tanggung jawab sering digunakan sebagai dasar normatif. Syauqi et al. (2025) menemukan bahwa penelitian mengenai penanaman nilai Islam di pendidikan tinggi berkembang pada berbagai konteks, tetapi pola implementasinya belum selalu terhubung dengan perubahan teknologi. Mardatillah et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa nilai pendidikan Islam dapat membentuk kohesi sosial, keadilan, toleransi, dan perdamaian di lingkungan pendidikan tinggi. Temuan tersebut penting karena mengingatkan bahwa nilai bukan hanya materi mata kuliah agama, melainkan cara seseorang berinteraksi, mengambil keputusan, dan menilai akibat dari tindakannya.

Kehadiran kecerdasan artifisial membuat kebutuhan akan kerangka nilai semakin jelas. AI generatif dapat membantu mahasiswa memulai pencarian gagasan, menyederhanakan teks kompleks, atau memperoleh umpan balik awal, tetapi juga dapat digunakan untuk menggantikan proses berpikir, menyembunyikan sumber, menghasilkan informasi keliru, atau memindahkan tanggung jawab akademik kepada mesin. Chan (2023) menekankan bahwa kebijakan AI di perguruan tinggi perlu mencakup dimensi pedagogis, tata kelola, dan operasional. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, Aflahah et al. (2026) menambahkan pentingnya membawa pertimbangan maqasid al-shariah ke dalam mitigasi risiko dan tata kelola AI agar inovasi tidak berhenti pada efisiensi teknis.

Kesenjangan antara religiusitas dan perilaku digital juga perlu diperhatikan. Nilai yang diyakini tidak selalu otomatis menjadi kompetensi ketika mahasiswa berada dalam lingkungan digital yang cepat, persuasif, dan penuh informasi. Naufalin et al. (2026) menunjukkan bahwa etika digital berperan penting dalam menjembatani religiusitas dan kompetensi digital. Temuan ini mempunyai implikasi langsung bagi perguruan tinggi: penguatan nilai Islam perlu diterjemahkan menjadi kemampuan konkret, seperti memverifikasi informasi, menjaga privasi, menyebutkan penggunaan AI secara jujur, menghormati hak intelektual, berkomunikasi dengan adab, dan mempertimbangkan dampak teknologi terhadap orang lain.

Transformasi digital juga tidak terjadi hanya di dalam kelas. Pengalaman mahasiswa dibentuk oleh organisasi kemahasiswaan, kegiatan ko-kurikuler, media sosial, layanan administrasi, ruang komunitas, serta interaksi dengan dosen dan teman sebaya. Yusnaini et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi yang terlalu berpusat pada administrasi dan kurikulum formal dapat mengabaikan ruang ko-kurikuler yang penting bagi pembentukan karakter dan keterlibatan Generasi Z. Karena itu, integrasi nilai Islam perlu mencakup ekosistem kampus secara keseluruhan agar pengalaman digital mahasiswa tidak terpisah dari proses pembentukan adab dan tanggung jawab sosial.

Permasalahan lain adalah kecenderungan membahas teknologi dan nilai melalui dua bahasa yang berbeda. Teknologi sering dibicarakan dengan istilah efisiensi, inovasi, otomatisasi, dan daya saing, sedangkan nilai Islam dibahas melalui istilah moralitas, karakter, dan religiusitas. Pemisahan ini membuat nilai mudah ditempatkan sebagai pelengkap setelah teknologi dipilih. Padahal keputusan sejak awal - teknologi apa yang digunakan, data apa yang dikumpulkan, tugas apa yang dapat dibantu AI, siapa yang berpotensi tertinggal, dan bagaimana kualitas pembelajaran dinilai - semuanya merupakan keputusan etis yang membutuhkan dasar nilai.

Tujuan artikel ini adalah menganalisis bentuk integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan tinggi pada era transformasi digital melalui sintesis 15 penelitian terbaru ber-DOI. Secara

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

khusus, kajian memetakan nilai yang paling relevan, menjelaskan penerapannya pada kurikulum, pembelajaran, asesmen, AI, etika akademik dan tata kelola, mengidentifikasi mekanisme penghubung antara nilai dan kompetensi digital, serta menawarkan model kematangan dan indikator evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan program di perguruan tinggi Islam.

Table 1. Islamic Values and Their Operational Meaning in Digital Higher Education

Value	Operational meaning	Digital integration arena
Tawhid	Unity of knowledge, purpose, responsibility, and human agency	Learning goals, curriculum, technology selection, AI use
Adab	Respectful interaction, proper conduct toward knowledge, teachers, peers, and sources	Online communication, discussion, citation, feedback, digital classroom
Amanah	Honesty, accountability, authorship, privacy, and responsible use of entrusted data	AI disclosure, academic integrity, research, data governance
Al-'Adl	Fair access, non-discrimination, proportional treatment, and human correction	Digital inclusion, paid tools, accessibility, algorithmic decisions
Ihsan	Quality, excellence, depth of learning, and responsible innovation	Pedagogy, feedback, digital service quality, learning design
Tabayyun & Maslahah	Verification of information and balancing benefits, risks, and educational purpose	AI outputs, information literacy, platform adoption, risk governance

Source: Authors' synthesis from Syauqi et al. (2025), Firdaus et al. (2025), Naufalin et al. (2026), Aflahah et al. (2026), and Mardatillah et al. (2025).

B. LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA)

B.1 Nilai Islam sebagai Arsitektur Pendidikan, Bukan Sekadar Ornamen

Integrasi nilai Islam dapat dipahami sebagai proses menjadikan nilai sebagai dasar untuk menentukan tujuan, prosedur, dan batas tindakan akademik. Dalam pengertian ini, nilai bukan tambahan berupa kutipan ayat atau pesan moral pada akhir perkuliahan, tetapi arsitektur yang memengaruhi bagaimana pengetahuan diproduksi dan digunakan. Syauqi et al. (2025) memperlihatkan beragam praktik integrasi nilai di pendidikan tinggi dan menegaskan perlunya agenda yang lebih sistematis. Nilai yang sering muncul - termasuk tauhid, amanah, ihsan, dan adab - memperoleh makna ketika diterjemahkan ke dalam kebiasaan belajar, interaksi, penelitian, kepemimpinan, serta tanggung jawab sosial.

Tauhid memberi orientasi bahwa ilmu dan teknologi tidak berdiri di ruang yang bebas nilai. Pengetahuan dipahami sebagai amanah yang digunakan untuk kemaslahatan, sehingga kecakapan digital tidak cukup diukur dari kecepatan atau kemampuan teknis. Adab mengatur cara individu memperlakukan guru, teman, sumber, dan ruang digital. Amanah berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab atas karya, serta penggunaan data. Keadilan menuntut akses dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Ihsan mendorong kualitas terbaik, sedangkan tabayyun menuntut verifikasi sebelum menerima atau menyebarkan informasi.

Pendekatan ini mencegah dua penyederhanaan. Pertama, anggapan bahwa teknologi otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, anggapan bahwa label keislaman otomatis menjamin penggunaan teknologi yang etis. Nilai perlu diwujudkan melalui desain yang dapat dilihat: rubrik penilaian yang menghargai transparansi penggunaan AI, prosedur perlindungan data, tugas yang mendorong verifikasi sumber, bantuan bagi mahasiswa dengan akses terbatas, dan kebijakan yang menjelaskan batas penggunaan teknologi tanpa mematikan inovasi.

B.2 Transformasi Digital Pendidikan Tinggi sebagai Perubahan Institusional

Transformasi digital berbeda dari digitalisasi sederhana. Digitalisasi dapat berarti mengubah formulir kertas menjadi formulir daring atau memindahkan bahan kuliah ke platform. Transformasi menuntut penyesuaian strategi, proses, kompetensi manusia, budaya organisasi, dan cara institusi menciptakan nilai. Fernández et al. (2023) menunjukkan bahwa inisiatif transformasi digital di perguruan tinggi mencakup banyak bidang dan perlu disatukan

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

melalui strategi yang koheren. Karena itu, integrasi nilai Islam harus mengikuti skala transformasi tersebut, tidak hanya hadir pada konten pembelajaran agama.

Dalam pendidikan tinggi Islam, transformasi institusional berarti teknologi perlu dibaca sebagai bagian dari visi pendidikan. Firdaus et al. (2025) menunjukkan pengalaman UIN Siber Cirebon dalam menghubungkan identitas keislaman dengan transformasi berbasis teknologi. Nento dan Abdullah (2025) juga menekankan pentingnya strategi yang menggabungkan inovasi digital dengan identitas dan kebijaksanaan lokal. Dua kajian ini memperlihatkan bahwa keputusan digital yang berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan, budaya, serta kerangka nilai yang dipahami oleh orang yang menjalankannya.

Dengan demikian, ukuran transformasi tidak dapat hanya berupa jumlah aplikasi, bandwidth, atau kelas daring. Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah teknologi membuat pembelajaran lebih bermakna, layanan lebih adil, keputusan lebih transparan, dan mahasiswa lebih mampu bertanggung jawab. Kampus dapat sangat maju secara teknis tetapi tetap menghadapi plagiarisme, ketimpangan akses, komunikasi yang kasar, informasi yang tidak diverifikasi, atau ketergantungan pada AI. Nilai Islam membantu menggeser evaluasi dari sekadar adopsi teknologi menuju kualitas dampaknya.

B.3 Kecerdasan Artifisial, Etika Digital, dan Integritas Akademik

Kecerdasan artifisial mempertemukan manfaat dan risiko dalam satu alat. Faizin et al. (2025) menunjukkan bahwa penerimaan AI pada mahasiswa Muslim dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat dalam konteks pendidikan agama. Megawati et al. (2025) juga menunjukkan potensi AI dalam mendukung efikasi diri, kreativitas, dan kinerja pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi Islam. Temuan ini menjadi alasan untuk tidak memandang AI semata-mata sebagai ancaman. Namun, penerimaan dan manfaat perlu diimbangi dengan pemahaman etis tentang batas bantuan teknologi.

Sundowo et al. (2024) menegaskan bahwa era digital menambah tantangan terhadap etika akademik. Persoalannya tidak hanya plagiarisme tradisional, tetapi juga ketidakjelasan kepengarangan, reproduksi informasi tanpa verifikasi, manipulasi teks, dan penggunaan alat yang mengaburkan proses belajar. Chan (2023) menawarkan kerangka kebijakan AI yang mencakup pedagogi, tata kelola, serta operasional. Dalam pendidikan tinggi Islam, kerangka tersebut dapat diperdalam dengan amanah sebagai dasar kejujuran, tabayyun sebagai kewajiban memeriksa keluaran AI, dan adab sebagai pengakuan terhadap kontribusi manusia serta sumber pengetahuan.

Pendekatan etis tidak identik dengan larangan menyeluruh. Larangan yang terlalu umum mudah tertinggal oleh perubahan teknologi dan dapat mendorong penggunaan tersembunyi. Pilihan yang lebih mendidik adalah menetapkan prinsip penggunaan yang transparan: kapan AI boleh dipakai, untuk tujuan apa, bagian apa yang harus dikerjakan sendiri, bagaimana bantuan AI dinyatakan, serta bagaimana mahasiswa memverifikasi fakta dan mempertanggungjawabkan hasil akhirnya. Dengan cara ini, integritas tidak bergantung pada kemampuan kampus mendeteksi teknologi, tetapi tumbuh sebagai kompetensi akademik.

B.4 Mekanisme Penghubung: Etika Digital, Agensi Manusia, dan Budaya Akademik

Nilai tidak langsung berubah menjadi perilaku hanya karena mahasiswa mengetahui definisinya. Naufalin et al. (2026) memperlihatkan bahwa etika digital dapat menjadi jembatan antara religiusitas dan kompetensi digital. Artinya, keyakinan nilai perlu melewati proses penerjemahan: mahasiswa belajar mengenali situasi etis, mempertimbangkan pilihan, memahami konsekuensi, lalu mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut membentuk agensi manusia, yaitu kemampuan tetap menjadi pengambil keputusan ketika teknologi menawarkan jalan yang lebih cepat.

Budaya akademik memperkuat atau melemahkan mekanisme tersebut. Jika dosen hanya menuntut produk akhir tanpa membahas proses, mahasiswa akan terdorong mengejar hasil dengan cara tercepat. Jika kampus menilai keterbukaan sumber, argumentasi, refleksi proses, dan kualitas verifikasi, mahasiswa memperoleh sinyal berbeda. Tanti et al. (2025) menunjukkan

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

bahwa pengalaman pembelajaran daring di pendidikan tinggi Islam dipengaruhi oleh konteks pedagogis dan nilai, sedangkan Yusnaini et al. (2025) menyoroti pentingnya ruang ko-kurikuler bagi pembentukan keterlibatan Generasi Z.

Mekanisme terakhir adalah tata kelola. Aflahah et al. (2026) menunjukkan kebutuhan menghubungkan mitigasi risiko AI dengan normativitas Islam dan maqasid al-shariah. Tata kelola membuat nilai tidak bergantung pada kesadaran personal semata, karena institusi menentukan standar, menyediakan pelatihan, menangani pelanggaran, dan melakukan evaluasi. Integrasi yang matang terjadi ketika nilai personal, kompetensi digital, budaya pembelajaran, dan tata kelola saling mendukung.

C. METHOD (METODE)

Penelitian ini menggunakan integrative evidence synthesis dengan orientasi applied review. Pendekatan dipilih karena tujuan artikel adalah menggabungkan temuan mutakhir mengenai nilai Islam, transformasi digital pendidikan tinggi, kecerdasan artifisial, etika digital, integritas akademik, keterlibatan mahasiswa, dan tata kelola tanpa menciptakan data primer yang tidak tersedia. Sintesis diarahkan untuk menemukan pola hubungan, mekanisme, serta implikasi praktis yang dapat digunakan untuk merancang pembelajaran dan kebijakan di perguruan tinggi Islam.

Sumber inti terdiri atas 15 publikasi peer-reviewed yang terbit pada periode 2023-2026 dan seluruhnya memiliki Digital Object Identifier (DOI) yang dapat diverifikasi. Literatur dipilih apabila membahas pendidikan tinggi, pendidikan tinggi Islam, mahasiswa Muslim, transformasi digital, AI, etika akademik, kompetensi digital, integrasi nilai Islam, pembelajaran daring, kepemimpinan, atau keterlibatan mahasiswa. Periode terbaru digunakan agar analisis mencerminkan perubahan yang berlangsung setelah penggunaan AI generatif meluas di lingkungan akademik.

Penelusuran dilakukan secara terarah menggunakan kombinasi kata kunci berbahasa Indonesia dan Inggris, antara lain "Islamic values higher education digital transformation", "Islamic higher education artificial intelligence", "digital ethics religiosity higher education", "academic ethics Islamic higher education digital era", "Islamic values university digital technology", "AI policy higher education", dan "Gen-Z Islamic higher education digital". Informasi bibliografis, volume, halaman, serta DOI diverifikasi melalui laman jurnal, penerbit, atau metadata publikasi.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, setiap artikel dipetakan berdasarkan konteks, metode, fokus teknologi, nilai yang dibahas, dan implikasi pendidikan. Kedua, temuan dikodekan ke dalam domain kurikulum dan pedagogi, asesmen dan integritas, AI dan literasi informasi, pengalaman mahasiswa, inklusi digital, serta tata kelola. Ketiga, nilai tauhid, adab, amanah, al-'adl, ihsan, tabayyun, dan maslahah diposisikan sebagai kategori interpretatif untuk membaca bentuk penerapan. Keempat, pola yang berulang disusun menjadi model integrasi dan tingkat kematangan.

Artikel ini membedakan bukti empiris dan interpretasi konseptual. Pernyataan mengenai hasil penelitian tertentu hanya digunakan sejauh didukung oleh studi yang ditelaah. Sementara itu, pemetaan nilai, jalur integrasi, indikator evaluasi, dan model kematangan disusun sebagai hasil sintesis penulis berdasarkan konsistensi tema. Artikel tidak menyajikan koefisien, persentase, atau hasil uji statistik baru yang tidak berasal dari penelitian asli, sehingga istilah "hasil" dalam pembahasan merujuk pada hasil sintesis bukti.

Keterbatasan metode adalah bahwa kajian ini bukan systematic review formal atau meta-analysis. Penelusuran tidak dimaksudkan menghitung seluruh publikasi yang pernah terbit, melainkan memilih 15 sumber terbaru yang relevan dan memiliki DOI untuk membangun kerangka terapan. Kekuatan pendekatan berada pada integrasi perspektif yang biasanya terpisah: transformasi kelembagaan, AI, etika, nilai Islam, pengalaman belajar, dan tata kelola. Kerangka yang dihasilkan tetap perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan pada berbagai jenis perguruan tinggi.

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Table 2. Synthesis of 15 Recent Studies Used in the Review

Study	Focus/context	Main implication for this article
Aflahah et al. (2026)	PTKIN; AI ethics and risk governance	AI governance should connect practical risk mitigation with Islamic normativity and maqasid.
Chan (2023)	University AI policy; students and staff	AI policy needs pedagogical, governance, and operational dimensions rather than a single prohibition.
Faizin et al. (2025)	Muslim university students; AI acceptance	Perceived usefulness and ease shape acceptance; ethical guidance is needed as AI becomes normalized.
Fernández et al. (2023)	Higher education digital transformation review	Digital transformation is organizational and strategic, not merely the adoption of digital tools.
Firdaus et al. (2025)	UIN Siber Cirebon; values and technology	Islamic values can be integrated with digital institutional transformation and epistemic identity.
Mardatillah et al. (2025)	Higher education in Aceh; Islamic educational values	Islamic values can support justice, social cohesion, and responsible relationships beyond the classroom.
Megawati et al. (2025)	Indonesian Islamic HE; AI and student outcomes	AI has learning potential when supported by student capability and a holistic institutional strategy.
Naufalin et al. (2026)	Islamic HE students; religiosity, ethics, digital competence	Digital ethics can mediate the relationship between religiosity and digital competence.
Nento & Abdullah (2025)	Islamic HE; digital innovation and local wisdom	Strategic leadership can align digital innovation with institutional identity and local values.
Rizal et al. (2026)	PTKIS; Society 5.0 systematic review	Digital transformation should remain oriented to insan kamil, integrated curriculum, and value-based leadership.
Sundowo et al. (2024)	Islamic HE; academic ethics in the digital era	Digitalization intensifies the need for academic integrity, ethical reinforcement, and institutional consistency.
Syauqi et al. (2025)	Islamic values in higher education; research mapping	Tawhid, amanah, ihsan, adab, and related values require systematic forms of implementation.
Syukur et al. (2024)	Islamic universities in Indonesia and Thailand; AI	Institutional responses to AI depend on readiness, pedagogy, and the capacity to guide responsible use.
Tanti et al. (2025)	Islamic HE online learning; student satisfaction	Digital learning outcomes remain connected to social, pedagogical, and faith-based learning contexts.
Yusnaini et al. (2025)	Gen-Z; co-curricular Islamic HE	Value integration should include co-curricular and student-engagement spaces, not only formal curriculum.

Source: Authors' synthesis of 15 peer-reviewed publications with DOI, 2023-2026.

D. RESULTS AND DISCUSSION (HASIL DAN PEMBAHASAN)

D.1 Integrasi Nilai Harus Mengubah Keputusan, Bukan Hanya Bahasa Institusi

Hasil sintesis memperlihatkan satu pola utama: integrasi nilai Islam menjadi bermakna ketika nilai memengaruhi keputusan akademik dan institusional. Syauqi et al. (2025), Firdaus et al. (2025), dan Rizal et al. (2026) sama-sama menunjukkan pentingnya keterhubungan antara nilai, kurikulum, kepemimpinan, dan transformasi pendidikan. Karena itu, keberadaan visi keislaman atau mata kuliah agama belum cukup menjadi bukti integrasi apabila aturan penggunaan AI, desain asesmen, pengelolaan data, serta praktik belajar sehari-hari tidak menunjukkan arah nilai yang sama.

Perbedaan antara integrasi simbolik dan integrasi operasional perlu ditegaskan. Integrasi simbolik mudah terlihat melalui istilah religius dalam dokumen, slogan, atau kegiatan seremonial. Integrasi operasional tampak ketika mahasiswa wajib menyebutkan kontribusi AI, ketika dosen menilai proses berpikir, ketika kampus melindungi data, ketika sumber diperiksa sebelum dipakai, dan ketika mahasiswa yang mempunyai keterbatasan akses memperoleh dukungan. Nilai dengan demikian bekerja sebagai standar tindakan, bukan sekadar identitas.

Dari sudut pendidikan, pendekatan ini penting karena mahasiswa belajar nilai bukan hanya dari apa yang dikatakan dosen, tetapi juga dari sistem yang mereka alami. Jika kampus berbicara tentang amanah tetapi asesmen hanya mengejar keluaran tanpa memperhatikan proses, pesan yang diterima menjadi kontradiktif. Sebaliknya, kebijakan yang konsisten memberi pengalaman bahwa kejujuran, kualitas, keadilan, dan tanggung jawab memang

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

menjadi bagian dari kehidupan akademik. Integrasi yang kuat selalu mempunyai jejak perilaku yang dapat diamati.

D.2 Tauhid sebagai Pusat Orientasi Universitas Digital

Tauhid memberi landasan epistemik bahwa ilmu, teknologi, manusia, dan tanggung jawab moral tidak dipisahkan. Dalam konteks transformasi digital, tauhid tidak berarti setiap teknologi harus diberi label agama, tetapi setiap penggunaan teknologi ditempatkan dalam tujuan pendidikan yang lebih utuh. Rizal et al. (2026) menghubungkan transformasi digital dengan orientasi insan kamil, integrasi kurikulum, dan kepemimpinan berbasis nilai. Kerangka tersebut relevan untuk menghindari reduksi pendidikan menjadi proses teknis yang hanya mengejar efisiensi atau kecepatan.

Pada level pembelajaran, orientasi tauhid mengubah pertanyaan dari "apakah AI dapat mengerjakan tugas ini?" menjadi "apa tujuan belajar yang ingin dicapai dan bagian mana yang tetap harus dijalani manusia?" AI dapat dipakai untuk membantu pemetaan ide atau memberi contoh, tetapi mahasiswa tetap perlu membaca, menimbang argumen, mengambil posisi, dan bertanggung jawab atas teks akhir. Teknologi berada di bawah tujuan pendidikan, bukan sebaliknya. Prinsip ini menjaga agar kemudahan tidak menghilangkan proses intelektual yang justru menjadi inti pembelajaran.

Pada level institusi, tauhid juga menolak fragmentasi antara unit teknologi dan unit akademik. Transformasi digital seharusnya dirancang bersama oleh pengelola teknologi, pimpinan akademik, dosen, mahasiswa, dan pihak yang memahami etika serta nilai keislaman. Fernández et al. (2023) menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan integrasi strategi dan organisasi. Pendidikan tinggi Islam dapat memperkuat pendekatan tersebut dengan memastikan bahwa pilihan sistem, data, dan otomatisasi selalu dibaca dalam hubungannya dengan misi pendidikan dan tanggung jawab sosial.

Implikasi praktisnya adalah perlunya pernyataan tujuan untuk setiap inisiatif digital. Kampus tidak cukup menanyakan biaya dan fitur, tetapi juga manfaat pendidikan, risiko terhadap kemandirian berpikir, akses kelompok rentan, keamanan data, dan kualitas hubungan manusia. Pertanyaan semacam ini membuat tauhid berfungsi sebagai kerangka orientasi, bukan konsep abstrak. Kesatuan ilmu dan nilai terlihat ketika keputusan teknis dapat dijelaskan dengan alasan pendidikan dan moral yang jelas.

D.3 Adab sebagai Struktur Etis Interaksi Digital dan Pembelajaran

Adab memperoleh bentuk baru ketika interaksi akademik berlangsung melalui layar. Cara mahasiswa mengirim pesan, memberikan komentar, berdiskusi, mengutip karya, menyimpan gambar orang lain, atau menyampaikan kritik merupakan bagian dari pembelajaran moral. Digitalisasi memperluas ruang komunikasi, tetapi juga mengurangi banyak petunjuk sosial yang biasanya hadir dalam pertemuan langsung. Karena itu, adab digital perlu diajarkan secara eksplisit agar kecepatan komunikasi tidak mengurangi rasa hormat, kehati-hatian, dan tanggung jawab.

Adab juga berkaitan dengan hubungan terhadap ilmu. Mengambil keluaran AI tanpa membaca atau memeriksa sumber menunjukkan masalah yang lebih dalam daripada sekadar pelanggaran teknis; tindakan tersebut mengabaikan proses memperoleh pengetahuan secara bertanggung jawab. Syukur et al. (2024) menunjukkan bahwa respons perguruan tinggi Islam terhadap AI membutuhkan kesiapan pembelajaran dan institusi. Kesiapan tersebut seharusnya mencakup kemampuan dosen membimbing mahasiswa menggunakan AI sebagai alat bantu tanpa kehilangan penghormatan pada proses belajar.

Dalam kelas daring, adab terlihat pada ketepatan waktu, kesiapan mengikuti pembelajaran, cara menyela, penggunaan ruang percakapan, serta kesediaan mendengar argumen berbeda. Tanti et al. (2025) mengingatkan bahwa kepuasan dan pengalaman belajar di pendidikan tinggi Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan pedagogis. Teknologi yang baik tetapi digunakan tanpa budaya interaksi yang sehat akan menghasilkan pengalaman belajar yang

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

dangkal. Karena itu, etika komunikasi digital perlu masuk ke kontrak belajar, rubrik partisipasi, dan praktik dosen.

Adab tidak seharusnya diterapkan sebagai aturan satu arah yang hanya menuntut mahasiswa patuh. Dosen dan institusi juga harus menunjukkan adab dalam memberi umpan balik, mengelola data, merespons pertanyaan, serta menggunakan teknologi pengawasan. Hubungan yang bermartabat menuntut proporsionalitas: kampus boleh menjaga integritas, tetapi tidak boleh menganggap setiap mahasiswa sebagai pelanggar. Prinsip adab mendorong tata kelola yang tegas sekaligus manusiawi.

D.4 Amanah: Penggunaan AI, Kepengarangan, Integritas Akademik, dan Data

Amanah merupakan nilai yang paling langsung berhubungan dengan integritas akademik. Mahasiswa bertanggung jawab atas karya yang diserahkan atas namanya, sedangkan dosen bertanggung jawab atas penilaian dan bahan ajar yang digunakan. Kehadiran AI membuat batas bantuan dan kepengarangan menjadi lebih rumit. Sundowo et al. (2024) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi memperbesar tantangan etika akademik di institusi pendidikan tinggi Islam. Oleh karena itu, amanah perlu diterjemahkan menjadi aturan transparansi, bukan hanya seruan untuk jujur.

Aturan transparansi dapat dimulai dengan membedakan penggunaan AI yang bersifat administratif, suportif, dan substantif. Pemeriksaan tata bahasa atau pembuatan daftar ide tidak sama dengan menyerahkan seluruh analisis kepada AI. Mahasiswa perlu menyatakan alat yang digunakan, tujuan penggunaan, dan bagian yang dipengaruhi secara material apabila kebijakan tugas mengharuskannya. Dosen pada saat yang sama perlu menjelaskan batas bantuan yang diperbolehkan sejak awal. Kejelasan ini membuat integritas menjadi kontrak pendidikan yang dapat dipahami bersama.

Amanah juga mencakup tanggung jawab terhadap data. Platform digital mengumpulkan identitas, aktivitas belajar, nilai, pola interaksi, dan kadang bahan tugas yang sensitif. Kampus perlu menilai apakah data memang diperlukan, siapa yang dapat mengakses, berapa lama disimpan, dan apakah mahasiswa mengetahui penggunaannya. Chan (2023) menempatkan privasi, keamanan, dan akuntabilitas sebagai bagian penting tata kelola AI. Dalam perspektif amanah, data mahasiswa bukan sekadar aset teknis, melainkan titipan yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan amanah menggeser fokus dari "bagaimana mendeteksi kecurangan" menuju "bagaimana membangun proses yang jujur". Deteksi tetap dapat diperlukan, tetapi pendidikan integritas lebih kuat apabila asesmen dirancang untuk merekam proses: proposal awal, catatan sumber, diskusi, revisi, refleksi, dan pertanggungjawaban lisan. Bukti proses membuat mahasiswa tetap menjadi pemilik karya intelektualnya, sekaligus mengurangi insentif menyerahkan seluruh pekerjaan kepada teknologi.

D.5 Al-'Adl: Inklusi Digital dan Keadilan dalam Akses Teknologi

Transformasi digital dapat memperluas akses, tetapi juga menghasilkan bentuk ketimpangan baru. Mahasiswa berbeda dalam kualitas perangkat, jaringan, kemampuan berlangganan layanan, literasi digital, kondisi disabilitas, dan ruang belajar. Karena itu, penggunaan teknologi yang sama bagi semua mahasiswa belum tentu menghasilkan perlakuan yang adil. Nilai al-'adl menuntut kampus melihat kebutuhan yang berbeda dan merancang dukungan agar teknologi tidak memperbesar jarak antar kelompok.

Keadilan juga relevan pada penggunaan AI berbayar. Jika tugas secara tidak langsung membutuhkan versi premium yang hanya dapat diakses sebagian mahasiswa, hasil belajar akan bercampur dengan kemampuan ekonomi. Dosen perlu menyediakan alternatif yang setara, menggunakan alat yang dapat diakses institusi, atau merancang tugas yang tidak bergantung pada fitur berbayar. Prinsip keadilan membuat keputusan teknologi selalu mempertimbangkan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang berpotensi tertinggal.

Mardatillah et al. (2025) memperlihatkan bahwa nilai pendidikan Islam di perguruan tinggi dapat berkontribusi terhadap keadilan sosial dan kohesi. Dalam ruang digital, semangat yang

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

sama berarti melindungi mahasiswa dari diskriminasi, perundungan, bias otomatis, dan eksklusi. Jika sistem AI digunakan untuk rekomendasi atau penilaian, institusi perlu memahami keterbatasan model, menyediakan mekanisme koreksi manusia, serta memastikan keputusan penting tidak diserahkan sepenuhnya pada algoritma yang tidak transparan.

Keadilan akhirnya menuntut pengukuran. Kampus perlu melihat bukan hanya tingkat penggunaan platform, tetapi kesenjangan partisipasi dan hasil. Data dapat dipilah secara hati-hati untuk menemukan kelompok yang mengalami hambatan, kemudian digunakan untuk memperbaiki dukungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa analitik pendidikan tidak bertentangan dengan nilai, selama pengumpulan dan pemanfaatannya dilakukan secara amanah, proporsional, dan berorientasi pada pemerataan manfaat.

D.6 Ihsan: Mutu sebagai Ukuran Utama Inovasi Digital

Ihsan menempatkan kualitas dan kesungguhan sebagai ukuran penting. Dalam transformasi digital, nilai ini membantu membedakan inovasi yang benar-benar memperbaiki pembelajaran dari inovasi yang hanya terlihat modern. Megawati et al. (2025) menunjukkan bahwa AI memiliki potensi mendukung efikasi diri, kreativitas, dan kinerja pembelajaran. Potensi tersebut tidak akan muncul secara otomatis. Dosen perlu merancang aktivitas yang membuat teknologi memperkaya eksplorasi, bukan mengurangi keterlibatan mahasiswa dengan materi.

Ihsan juga berarti tidak menggunakan efisiensi sebagai satu-satunya alasan. Otomatisasi umpan balik mungkin menghemat waktu, tetapi dosen perlu memastikan kualitas, konteks, dan kesempatan dialog tetap tersedia. Pembelajaran berkualitas sering membutuhkan sentuhan manusia pada bagian yang kompleks: mengoreksi miskonsepsi, memahami kesulitan mahasiswa, atau menantang argumen yang terlalu sederhana. Teknologi dapat menangani pekerjaan rutin agar manusia mempunyai lebih banyak ruang untuk fungsi pendidikan yang bernilai tinggi.

Budaya ihsan mengajak mahasiswa menghasilkan karya terbaik yang mampu mereka pertanggungjawabkan, bukan sekadar memenuhi tenggat. Penggunaan AI diperbolehkan sejauh meningkatkan kualitas proses - misalnya membandingkan alternatif penjelasan atau memperoleh umpan balik awal - tetapi keputusan akhir tetap membutuhkan penilaian manusia. Dengan demikian, ihsan menjaga agar transformasi digital tidak mengubah pendidikan menjadi produksi tugas yang cepat namun miskin kedalaman.

D.7 Tabayyun: Verifikasi sebagai Inti Literasi Informasi dan AI

Tabayyun sangat relevan pada lingkungan digital yang dipenuhi konten cepat, potongan informasi, dan keluaran AI yang tampak meyakinkan. Mahasiswa perlu belajar bahwa kefasihan bahasa tidak sama dengan kebenaran. AI dapat menghasilkan referensi yang tidak ada, menyederhanakan perdebatan, atau memberikan jawaban yang tidak sesuai konteks. Karena itu, setiap penggunaan AI untuk pengetahuan harus diikuti kebiasaan memeriksa sumber primer, membandingkan informasi, dan menilai kredibilitas.

Tabayyun dapat dilatih melalui asesmen sederhana tetapi kuat. Dosen dapat memberikan keluaran AI yang mengandung beberapa klaim, lalu meminta mahasiswa melacak sumber dan mengklasifikasikan mana yang benar, meragukan, atau salah. Mahasiswa juga dapat diminta membandingkan jawaban AI dengan artikel ilmiah ber-DOI dan menjelaskan perbedaan argumentasinya. Aktivitas semacam ini mengubah larangan abstrak menjadi keterampilan verifikasi yang dapat digunakan sepanjang hidup.

Naufalin et al. (2026) menunjukkan hubungan penting antara etika digital dan kompetensi digital. Tabayyun menjelaskan salah satu bentuk kompetensi tersebut: pengguna tidak pasif menerima keluaran teknologi, tetapi mempunyai kebiasaan epistemik untuk memeriksa. Dalam pendidikan tinggi Islam, kemampuan verifikasi sekaligus merupakan kompetensi akademik dan moral, karena menyebarkan informasi yang tidak diperiksa dapat merugikan orang lain serta merusak kualitas ilmu.

D.8 Maslahah dan Maqasid sebagai Kriteria Tata Kelola dan Risiko Digital

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Maslahah membantu institusi menilai teknologi melalui keseimbangan manfaat, risiko, dan tujuan pendidikan. Tidak setiap teknologi yang mungkin digunakan perlu diadopsi, dan tidak setiap risiko mengharuskan pelarangan. Kampus perlu bertanya apakah suatu alat memperbaiki akses, kualitas, efisiensi, atau kemampuan belajar, kemudian membandingkannya dengan risiko terhadap privasi, integritas, ketergantungan, keadilan, dan martabat manusia. Kerangka ini menghasilkan keputusan yang lebih proporsional daripada sikap menerima atau menolak teknologi secara mutlak.

Aflahah et al. (2026) secara khusus menempatkan maqasid al-shariah dalam diskusi pengelolaan risiko AI pada pendidikan tinggi Islam. Implikasinya adalah kebijakan AI perlu bergerak dari daftar larangan menuju proses penilaian risiko yang terstruktur. Alat dengan risiko rendah dapat digunakan lebih fleksibel, sedangkan penggunaan yang menyentuh penilaian, keputusan akademik, data pribadi, atau peluang mahasiswa membutuhkan pengawasan yang lebih kuat, dokumentasi, dan jalur koreksi.

Maslahah juga menuntut evaluasi setelah teknologi diterapkan. Keputusan yang tampak baik di awal dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diperkirakan. Kampus perlu mengumpulkan umpan balik dosen dan mahasiswa, memantau masalah integritas, melihat kesenjangan akses, serta menilai apakah beban kerja berubah. Jika manfaat tidak sebanding dengan biaya atau risiko, institusi harus berani mengubah kebijakan. Kemampuan memperbaiki keputusan merupakan bagian dari tanggung jawab, bukan tanda kegagalan.

Pada level strategis, maslahah dapat menghubungkan inovasi dengan misi sosial perguruan tinggi. Teknologi seharusnya tidak hanya mempercepat layanan internal, tetapi memperluas dampak pendidikan, riset, dan pengabdian. Nento dan Abdullah (2025) menunjukkan bahwa inovasi digital dapat digabungkan dengan identitas dan kebijaksanaan lokal melalui kepemimpinan strategis. Nilai maslahah memberi pertanyaan akhir: siapa yang memperoleh manfaat, seberapa berkelanjutan manfaat tersebut, dan apakah ia sejalan dengan tujuan pendidikan Islam.

D.9 Kerangka Terintegrasi: Dari Nilai Islam menuju Kompetensi Digital Etis

Berdasarkan sintesis, integrasi dapat dirumuskan sebagai jalur empat tahap. Tahap pertama adalah Islamic value orientation: tauhid, adab, amanah, al-'adl, ihsan, tabayyun, dan maslahah memberi standar untuk menilai tujuan serta cara penggunaan teknologi. Tahap kedua adalah institutional translation: nilai diterjemahkan ke dalam kurikulum, pedagogi, asesmen, aktivitas kemahasiswaan, kebijakan AI, dan tata kelola data. Tahap ketiga adalah ethical digital competence: mahasiswa dan dosen mampu menggunakan, memeriksa, menjelaskan, serta membatasi teknologi. Tahap keempat adalah responsible academic practice: pembelajaran, penelitian, dan layanan digital yang jujur, bermutu, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknologi berada di sepanjang jalur tersebut sebagai alat sekaligus lingkungan yang membentuk pilihan. Platform dapat mendorong kolaborasi, tetapi juga distraksi; AI dapat meningkatkan eksplorasi, tetapi juga ketergantungan; analitik dapat membantu dukungan mahasiswa, tetapi juga menimbulkan masalah privasi. Nilai berfungsi sebagai kompas untuk membaca konsekuensi tersebut, sedangkan kebijakan dan desain pembelajaran membuat kompas itu dapat dipraktikkan dalam situasi nyata.

Kerangka ini menempatkan agensi manusia sebagai pusat. Teknologi boleh memperkuat kemampuan, tetapi keputusan akhir harus tetap dapat dijelaskan oleh manusia. Prinsip tersebut selaras dengan kebutuhan kebijakan AI yang ditekankan Chan (2023) serta pembacaan etis yang ditawarkan Aflahah et al. (2026). Kampus yang matang secara digital bukan kampus yang mengotomatisasi sebanyak mungkin proses, melainkan kampus yang tahu proses mana yang layak dibantu teknologi dan bagian mana yang memerlukan penilaian manusia.

Figure 1. Integrated Pathway from Islamic Values to Responsible Digital Higher Education

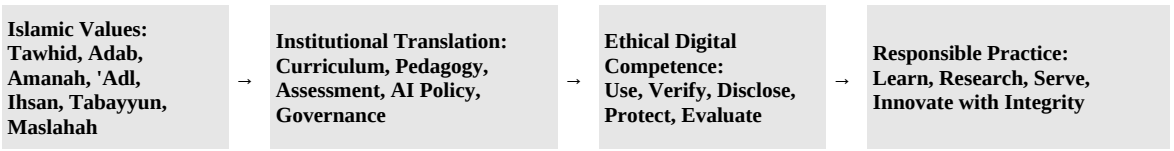

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Context conditions: AI exposure, digital infrastructure, lecturer competence, student diversity, institutional culture, leadership, access equity, and data governance. Source: Authors' synthesis, 2026.

D.10 Implikasi bagi Kurikulum, Pedagogi, dan Asesmen

Kurikulum perlu membuat keterkaitan antara nilai Islam dan kompetensi digital menjadi eksplisit. Nilai tidak hanya ditempatkan pada mata kuliah agama, tetapi masuk ke capaian pembelajaran yang relevan pada setiap bidang. Mahasiswa teknik dapat membahas bias dan keamanan sistem, mahasiswa ekonomi dapat membahas keadilan data dan otomatisasi keputusan, mahasiswa pendidikan dapat membahas penggunaan AI untuk belajar, sedangkan mahasiswa studi Islam dapat menilai implikasi teknologi melalui perspektif maqasid. Pola ini menjaga integrasi tanpa memaksakan materi yang sama pada semua program studi.

Pedagogi perlu beralih dari sekadar penggunaan alat menuju latihan mengambil keputusan. Faizin et al. (2025) menunjukkan bahwa penerimaan AI oleh mahasiswa dipengaruhi manfaat dan kemudahan yang dirasakan. Karena itu, dosen perlu memanfaatkan minat tersebut untuk mengajarkan penggunaan yang bertanggung jawab. Mahasiswa dapat diminta membandingkan jawaban manusia dan AI, memeriksa rujukan, merevisi keluaran yang bias, menyatakan kontribusi alat, dan menjelaskan alasan etis di balik pilihannya.

Asesmen merupakan titik paling penting karena menentukan perilaku belajar. Tugas yang hanya menuntut ringkasan umum sangat mudah dialihkan kepada AI. Sebaliknya, tugas berbasis konteks, data lokal, refleksi pengalaman, proses bertahap, diskusi lisan, dan bukti revisi lebih mampu menangkap kemampuan mahasiswa. Pendekatan ini bukan upaya "mengalahkan" AI, tetapi merancang tugas sehingga penggunaan alat tetap membutuhkan pemikiran, penilaian, dan tanggung jawab manusia.

Perguruan tinggi dapat mengembangkan Islamic digital ethics lab dalam bentuk modul lintas program studi. Laboratorium tidak harus berupa ruangan fisik; ia dapat berbentuk rangkaian kasus, simulasi, dan tugas singkat. Mahasiswa berlatih menghadapi dilema penggunaan AI, privasi data, komunikasi digital, bias, kepengarangan, dan informasi palsu. Setiap kasus dinilai melalui nilai yang relevan sehingga mahasiswa terbiasa menghubungkan konsep Islam dengan keputusan teknologi yang konkret.

Table 3. Suggested Campus-Based Islamic Digital Ethics Program

Module	Core activity	Observable outcome
Islamic digital worldview	Analyze a technology case through purpose, human agency, and educational benefit	Student can explain why technology is a means, not the final learning goal
Digital adab & communication	Review online interaction, feedback, citation, and digital classroom scenarios	Student communicates respectfully and treats sources and people responsibly
AI & academic integrity	Compare permitted and prohibited assistance; practice AI-use disclosure	Student can use AI transparently and defend the intellectual ownership of work
Tabayyun & information literacy	Verify AI claims, references, images, and online information using authoritative sources	Student can identify unreliable information and document verification steps
Justice, access & data	Analyze paid tools, accessibility, privacy, bias, and human appeal mechanisms	Student can identify unequal impact and propose a fairer digital design
Maslahah-based innovation	Evaluate a platform by benefit, risk, quality, sustainability, and mission alignment	Student can justify adoption, modification, limitation, or rejection of technology

Source: Authors' applied design based on the reviewed evidence.

D.11 Indikator Evaluasi yang Lebih Bermakna

Evaluasi integrasi nilai sebaiknya membedakan pemahaman, keterampilan, perilaku, dan outcome. Pemahaman mengukur apakah mahasiswa dapat menjelaskan nilai dan masalah etis. Keterampilan mengukur apakah mereka mampu memeriksa sumber, menggunakan AI transparan, melindungi data, dan menilai bias. Perilaku melihat konsistensi tindakan dalam tugas serta interaksi. Outcome menilai apakah proses tersebut menghasilkan karya yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, partisipasi yang lebih adil, dan keputusan digital yang lebih matang.

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Pengukuran tidak perlu selalu menggunakan instrumen panjang. Rubrik tugas dapat memuat aspek verifikasi sumber, transparansi alat, alasan pemilihan metode, dan refleksi risiko. Log pembelajaran dapat melihat proses revisi. Wawancara singkat atau viva dapat memastikan mahasiswa memahami teks yang diserahkan. Survei dapat memantau persepsi akses dan keamanan. Kombinasi bukti seperti ini lebih bermakna daripada sekadar menanyakan apakah mahasiswa "memiliki nilai Islam" karena fokusnya berada pada perilaku yang dapat diamati.

Evaluasi juga perlu dilakukan pada tingkat institusi. Kebijakan yang baik seharusnya mudah dipahami, diterapkan konsisten, menyediakan dukungan, dan mempunyai mekanisme peninjauan. Institusi dapat menilai berapa banyak program studi yang memiliki panduan AI, apakah dosen memperoleh pengembangan kompetensi, apakah keluhan privasi ditangani, apakah mahasiswa dengan akses terbatas mendapat alternatif, dan apakah keputusan otomatis mempunyai jalur banding manusia. Indikator institusional membuat nilai menjadi bagian dari sistem mutu.

Table 4. Recommended Monitoring and Evaluation Indicators

Evaluation level	Indicator	Suggested evidence
Value understanding	Explains tawhid, adab, amanah, justice, ihsan, tabayyun, and maslahah in digital cases	Case questions and short reflective explanation
Digital adab	Communicates respectfully, cites appropriately, and follows responsible online interaction norms	Discussion rubric, peer review, communication sample
Academic integrity	Discloses AI assistance, owns the argument, and can explain submitted work	AI-use statement, process portfolio, viva/oral check
Verification & literacy	Checks facts, sources, references, and AI outputs before use	Source audit, verification log, annotated assignment
Justice & inclusion	Recognizes access gaps, bias, accessibility needs, and unequal digital consequences	Scenario analysis, accessibility review, student access survey
Quality & human agency	Uses technology to improve learning without surrendering judgment and responsibility	Revision history, reflective rationale, performance task
Governance & maslahah	Policies address benefits, risk, data protection, support, review, and human appeal	Policy audit, incident log, staff training, periodic review

Source: Authors' proposed evaluation framework, 2026.

D.12 Keterbatasan Sintesis dan Agenda Pengujian Empiris

Artikel ini dibangun dari sintesis 15 publikasi dan tidak menyajikan data primer baru dari satu perguruan tinggi. Karena itu, model yang dihasilkan merupakan kerangka konseptual terapan, bukan estimasi empiris mengenai seluruh mahasiswa atau institusi pendidikan tinggi Islam. Bentuk integrasi dapat berbeda menurut disiplin ilmu, kultur kampus, kapasitas teknologi, karakter mahasiswa, serta kebijakan nasional. Variasi tersebut perlu dipahami sebagai konteks, bukan alasan untuk mengabaikan prinsip dasar.

Penelitian berikutnya dapat menguji model secara kuantitatif dengan Islamic value internalization sebagai variabel dasar, ethical digital competence sebagai mediator, dan responsible academic behavior sebagai outcome. Variabel tata kelola, kualitas kebijakan AI, akses digital, atau budaya akademik dapat diuji sebagai moderator. Instrumen sebaiknya menghindari pertanyaan yang hanya mengukur persetujuan normatif, karena responden cenderung menjawab nilai secara sosial diharapkan. Skenario keputusan dan tugas berbasis kasus dapat memberikan pengukuran yang lebih valid.

Desain longitudinal akan membantu melihat apakah pembelajaran etika digital benar-benar mengubah perilaku. Peneliti dapat mengukur kondisi awal, memberikan intervensi berbasis kasus selama satu semester, lalu menilai kualitas verifikasi sumber, transparansi penggunaan AI, dan integritas karya pada akhir periode. Data proses dapat digabungkan dengan wawancara untuk memahami alasan mahasiswa menggunakan atau menolak teknologi tertentu. Pendekatan ini lebih kuat daripada survei satu waktu yang hanya menangkap persepsi.

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Penelitian kualitatif juga diperlukan untuk menggali dilema yang belum tertangkap kebijakan. Dosen mungkin mempunyai definisi penggunaan AI yang berbeda, mahasiswa dapat merasa bingung karena aturan antar mata kuliah tidak sama, dan unit teknologi mungkin menghadapi tekanan efisiensi yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan pedagogis. Studi multi-kasus dapat memperlihatkan bagaimana nilai Islam dinegosiasikan dalam keputusan nyata dan membantu menyusun pedoman yang realistis bagi berbagai jenis perguruan tinggi.

D.13 Model Tingkat Kematangan Integrasi Nilai Islam dalam Transformasi Digital

Untuk kebutuhan evaluasi, hasil sintesis dapat diterjemahkan menjadi empat tingkat kematangan. Tingkat pertama adalah symbolic integration, ketika nilai Islam hadir pada visi, slogan, atau pernyataan umum tetapi belum terhubung dengan praktik digital. Tingkat kedua adalah programmatic integration, ketika sudah ada mata kuliah, seminar, atau panduan tertentu, namun penerapannya masih bergantung pada individu dan belum konsisten antar unit. Dua tingkat awal ini penting sebagai proses, tetapi belum cukup menjamin perubahan budaya.

Tingkat ketiga adalah systemic integration. Pada tahap ini capaian pembelajaran, desain asesmen, kebijakan AI, perlindungan data, pengembangan dosen, dukungan akses, dan kegiatan mahasiswa menggunakan prinsip nilai yang sama. Institusi mempunyai indikator, prosedur, dan mekanisme evaluasi. Tingkat keempat adalah reflective-transformative integration, yaitu ketika kampus tidak hanya menjalankan aturan tetapi secara rutin menilai dampak teknologi, memperbaiki kebijakan, melibatkan mahasiswa, dan mampu menolak atau mengubah teknologi ketika tidak lagi sejalan dengan tujuan pendidikan serta kemaslahatan.

Model kematangan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan label permanen pada institusi. Satu kampus dapat matang pada keamanan data tetapi masih programatik pada asesmen AI; dapat sistemik pada kurikulum tetapi belum adil dalam akses. Model lebih tepat digunakan sebagai alat diagnosis yang membantu menentukan prioritas perbaikan. Kemajuan diukur dari konsistensi antara nilai yang dinyatakan, praktik yang dijalankan, bukti yang dikumpulkan, dan kemampuan institusi belajar dari dampak teknologi.

Table 5. Maturity Levels of Islamic Value Integration in Digital Higher Education

Level	Typical pattern	Primary development need
1. Symbolic integration	Islamic values appear in vision and general statements but are weakly connected to digital practice	Translate values into concrete decisions, cases, and basic rules
2. Programmatic integration	Some courses, seminars, or AI guidelines exist, but implementation varies by lecturer or unit	Align curricula, assessment, staff development, and student support
3. Systemic integration	Values are embedded in learning outcomes, AI policy, data governance, access support, and quality assurance	Strengthen evidence, cross-unit consistency, and impact monitoring
4. Reflective-transformative integration	The institution reviews consequences, involves stakeholders, adapts policy, and can limit technology when misaligned	Advanced risk governance, continuous learning, and responsible innovation

Source: Authors' maturity model developed from the reviewed evidence, 2026.

D.14 Prinsip Praktis Pengambilan Keputusan Teknologi Berbasis Nilai Islam

Hasil sintesis dapat diringkas menjadi lima pertanyaan sebelum suatu teknologi digunakan untuk pembelajaran atau tata kelola. Pertama, apa tujuan dan maslahat pendidikan yang hendak dicapai? Kedua, apakah informasi, asumsi, dan keluaran teknologi dapat diverifikasi sebagai bentuk tabayyun? Ketiga, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana amanah terhadap karya serta data dijaga? Keempat, apakah akses dan dampaknya adil bagi kelompok berbeda? Kelima, apakah penggunaan teknologi tetap menjaga adab, kualitas, dan peran manusia dalam keputusan penting?

Lima pertanyaan tersebut dapat diterapkan pada banyak situasi. Dalam tugas, mahasiswa menilai apakah AI membantu tujuan belajar atau menggantikan proses. Dalam penelitian, peneliti memeriksa sumber, data, privasi, dan transparansi bantuan alat. Dalam administrasi, pimpinan menilai kebutuhan data, risiko, dan akses. Dalam pengadaan platform, institusi

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

melihat manfaat, biaya, bias, keamanan, serta mekanisme keluar. Satu kerangka nilai dapat menjaga konsistensi meskipun jenis teknologi berubah cepat.

Bagi perguruan tinggi, prinsip tersebut paling efektif apabila menjadi kebiasaan bersama. Dosen memodelkan transparansi, mahasiswa memperoleh ruang untuk bertanya tentang batas penggunaan AI, unit teknologi menjelaskan implikasi data, dan pimpinan meninjau kebijakan secara berkala. Integrasi nilai akhirnya bukan proyek satu unit, melainkan cara kampus mengambil keputusan. Transformasi digital yang berakar pada nilai akan terlihat bukan dari banyaknya teknologi yang digunakan, tetapi dari kualitas alasan di balik penggunaannya.

E. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS (KESIMPULAN DAN SARAN)

Sintesis terhadap 15 publikasi peer-reviewed periode 2023-2026 menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan tinggi pada era transformasi digital perlu bergerak dari tingkat normatif menuju tingkat operasional. Nilai tauhid, adab, amanah, al-'adl, ihsan, tabayyun, dan maslahah mempunyai relevansi langsung terhadap kurikulum, pembelajaran, asesmen, penggunaan AI, integritas akademik, perlindungan data, keterlibatan mahasiswa, inklusi digital, serta tata kelola institusi. Nilai menjadi bermakna ketika memengaruhi cara keputusan dibuat dan dapat dilihat dalam praktik sehari-hari.

Tauhid memberi orientasi bahwa teknologi merupakan alat di bawah tujuan pendidikan. Adab menjaga kualitas relasi dan penghormatan terhadap ilmu. Amanah menuntut kejujuran kepengarangan, transparansi penggunaan AI, serta tanggung jawab terhadap data. Al-'adl memperluas perhatian pada kesenjangan akses dan bias. Ihsan menjaga agar efisiensi tidak menurunkan mutu. Tabayyun membentuk kebiasaan verifikasi, sedangkan maslahah dan maqasid memberi kriteria untuk menimbang manfaat dan risiko pada level kebijakan.

Pengaruh nilai tidak bekerja secara otomatis. Pengetahuan religius perlu diterjemahkan menjadi etika digital, keterampilan, budaya akademik, dan tata kelola. Karena itu, rekomendasi utama bagi perguruan tinggi adalah menyatukan nilai dengan capaian pembelajaran, tugas, rubrik asesmen, panduan penggunaan AI, program pengembangan dosen, kegiatan mahasiswa, dan sistem mutu. Pembelajaran berbasis kasus sangat penting karena mahasiswa perlu berlatih mengambil keputusan, bukan hanya menghafal definisi nilai.

Perguruan tinggi juga perlu mengembangkan kebijakan AI yang jelas tetapi adaptif. Kebijakan sebaiknya membedakan tingkat risiko penggunaan, menjelaskan transparansi yang diperlukan, melindungi data, menjaga mekanisme keputusan manusia, dan memberikan ruang pembaruan ketika teknologi berubah. Larangan umum tanpa pendidikan penggunaan bertanggung jawab cenderung kurang efektif. Kampus perlu membangun agensi manusia sehingga mahasiswa dan dosen mampu menggunakan teknologi, memeriksa hasilnya, dan berani membatasi penggunaannya ketika tidak sesuai tujuan akademik.

Artikel ini terbatas pada evidence synthesis dan belum menguji model pada satu populasi tertentu. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan mixed methods, longitudinal design, atau SEM untuk menguji hubungan antara internalisasi nilai, etika digital, kompetensi digital, budaya akademik, kualitas tata kelola, dan perilaku akademik bertanggung jawab. Penelitian juga perlu membandingkan disiplin ilmu dan jenis perguruan tinggi karena risiko dan bentuk penggunaan teknologi berbeda menurut konteks.

Implikasi akhirnya adalah bahwa pendidikan tinggi Islam tidak perlu memilih antara identitas keislaman dan inovasi digital. Tantangan yang lebih penting adalah memastikan bahwa inovasi memperoleh arah. Kampus yang mampu menghubungkan teknologi dengan tauhid, adab, amanah, keadilan, ihsan, tabayyun, dan kemaslahatan dapat membentuk lulusan yang bukan hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan keputusan digitalnya. Di situlah transformasi digital menjadi bagian dari pendidikan manusia, bukan sekadar modernisasi sistem.

ACKNOWLEDGMENTS (UCAPAN TERIMA KASIH)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang mendukung pengembangan kajian mengenai

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

pendidikan Islam, etika akademik, dan transformasi digital. Artikel ini disusun sebagai kajian berbasis literatur dan tidak menggunakan data primer individu.

F. BIBLIOGRAPHY (DAFTAR PUSTAKA)

Aflahah, S., Nisa, K., Aldeia, A. M. S., Marannu, B., Ramli, M., Windyasari, V. S., & Ruhutama, T. S. (2026). AI, ethics, and Islamic higher education: Navigating the tensions between practical risk mitigation and religious normativity. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 26(1), 1-24. https://doi.org/10.22373/jiifv26.i1.32978

Chan, C. K. Y. (2023). A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20, Article 38. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00408-3

Faizin, N., Alfan, M., Basid, A., Ramadhan, M. R., Panatik, S. A., & Kawakip, A. N. (2025). Muslim students' acceptance of artificial intelligence in Islamic religious education: An extended TAM approach. Discover Education, 4, Article 304. https://doi.org/10.1007/s44217-025-00767-1

Fernández, A., Gómez, B., Binjaku, K., & Kajo Meçe, E. (2023). Digital transformation initiatives in higher education institutions: A multivocal literature review. Education and Information Technologies, 28, 12351-12382. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11544-0

Firdaus, S., Suwendi, Nafi'a, I., Gumiandari, S., Huriyah, & Juanda, A. (2025). Transforming Islamic higher education: Integrating Islamic values and digital technology at UIN Siber Cirebon. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 13(3), 2337-2362. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.2330

Mardatillah, F., Muchlinarwati, & Abdurrahman, D. (2025). Integrating Islamic educational values in higher education: A framework for social cohesion and peacebuilding in Aceh. Journal of Peacebuilding & Development, 20(2), 150-170. https://doi.org/10.1177/15423166251342683

Megawati, S., Alfarizi, M., & Wahyuni, J. (2025). Artificial intelligence revolution in Indonesian Islamic higher education: How it affects students' self-efficacy, creativity, and learning performance. Journal of Educators Online, 22(4), Article 11. https://doi.org/10.9743/JEO.2025.22.4.11

Naufalin, L. R., Indrawati, C. D. S., Indriayu, M., & Noviani, L. (2026). Bridging religiosity and digital competence: The mediating role of digital ethics in higher education. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(1), 92-108. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v7i1.2455

Nento, S., & Abdullah, A. H. (2025). Integration of local wisdom and digital innovation: A strategic management model for Islamic higher education institutions in developing countries. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(3), 961-975. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v9i3.12292

Rizal, M., Ginanjar, M. H., Nurhasan, A. K., & Dainuri, M. R. (2026). Insan Kamil-oriented Islamic higher education in Society 5.0: A systematic literature review of digital transformation, curriculum integration, and value-based Islamic leadership. Jurnal Pendidikan Islam, 14(2), 357-375. https://doi.org/10.14421/jpi.2025.142.357-375

Sundowo, E., Asari, H., Anas, M. H., Lestari, A., & Lubis, S. (2024). Academic ethics of Islamic higher education institutions in the digital era. EDUTEC: Journal of Education and Technology, 8(1), 178-185. https://doi.org/10.29062/edu.v8i1.915

Syauqi, M. L., Ghozali, M. Y., Khairah, R., Nurzen, K., Muksin, A., Romdhon, M. R., Prasetiawan, A. Y., Rezi, M., Sayska, D. S., & Muftadin, D. (2025). Embedding Islamic values in higher education: Trends, practices, and future research agenda. Research Journal in Advanced Humanities, 6(4). https://doi.org/10.58256/sfz8ag27

Syukur, F., Maghfurin, A., Marhamah, U., & Jehwae, P. (2024). Integration of artificial intelligence in Islamic higher education: Comparative responses between Indonesia and

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License

Thailand. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 7(3), 531-553. https://doi.org/10.31538/nzh.v7i3.13

Tanti, T., Anwar, K., Jamaluddin, J., Saleh, A. S., Yusup, D. K., & Jahanifar, M. (2025). Faith meets technology: Navigating student satisfaction in Indonesia's Islamic higher education online learning. Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi, 9(2), 695-708. https://doi.org/10.22437/jiituj.v9i2.41513

Yusnaini, Nuriman, & Setiawan. (2025). Reframing Gen-Z engagement in Islamic higher education: Integrating Islamic values into co-curricular frameworks in the digital era. ABANNA: Journal of Contemporary Islamic Education, 3(2), 79-100. https://doi.org/10.71036/ajcie.v3i2.431

This Article is licensed under a CC BY-SA 4.0 International License